



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JAPRIZAL
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 193321

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.887.250.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 707 m2/192 m2 di KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 1.067.250.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 357 m2/127 m2 di NATUNA, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
3. Tanah Seluas 50000 m2 di NATUNA, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 1000 m2 di KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
5. Tanah Seluas 78 m2 di KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 38.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SCORPIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. LAINNYA, FIRMAN GENSET Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. LAINNYA, (SEPEDA) SEPEDA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 160CC Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 38.670.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 93.323.871

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| Sub Total | Rp. | 2.057.243.871 |
| III. HUTANG | Rp. | 145.000.000 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 1.912.243.871 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.